

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

DIAJUKAN OLEH
SERFINA BTE LEONARDUS
4513013028



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nama Mahasiswa : Serfina Bte Leonardus

Nomor Stambuk : 4513013028

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Muh. Idris, SE., M.Si


Thanwain, SE., M.Si

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

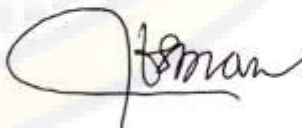
Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Bosowa




Dr. H.A. Afduddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Serfina Bte Leonardus

Nim : 4513013028

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN** berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 30 Mei 2017

Mahasiswa yang bersangkutan

Serfina Bte Leonardus

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Serfina Bte Leonardus

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa Makassar

Muh.Idris

Thanwain

ABSTRAK

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menjawab kebutuhan informasi para pemegang kepentingan laporan keuangan sebagai landasan kinerja suatu instansi atau organisasi. Makassar sebagai Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sorotan terutama dalam upaya penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Penulisan ini membahas mengenai pengelolaan keuangan pada dinas pendidikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan keuangan pada kantor dinas pendidikan Sulawesi Selatan. Jenis data kualitatif dan data kuantitatif di gunakan dalam penelitian berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang sedikit lebih jelas mengenai keefektivitasan pengelolaan keuangan terhadap kantor dinas pendidikan Sulawesi Selatan. Melakukan perbandingan keuangan Dinas Pendidikan tiap tahunnya dan Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengelolaan dengan rencana pengelolaan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. Kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan oleh Kantor Dinas Pendidikan kota Makassar untuk tahun anggaran masing-masing 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 telah mencapai kriteria Efektif.

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE OFFICE OF EDUCATION PROVINCE OF SULAWESI SELATAN

Serfina Bte Leonardus

Accounting Study Program of the Faculty of Economics

Bosowa University Makassar

Muh. Idris

Thanwain

ABSTRACT

Accounting is a scientific discipline that answers the information needs of the stakeholders of financial statements as the basis for the performance of an agency or organization. Makassar as the Middle City of South Sulawesi Province received the spotlight, especially in an effort to assess the performance of the South Sulawesi Provincial Education Office. This writing discusses the financial management of the education office. The purpose of this research is to find out the effectiveness of financial management performance at the South Sulawesi education office. The types of qualitative data and quantitative data are used in the study trying to get a little clearer information about the effectiveness of financial management in the South Sulawesi education office. Conduct financial comparisons of the Office of Education each year and Effectiveness Analysis, used to determine the effectiveness of financial management at the South Sulawesi Education Office, which is by using a comparison ratio between the realization of management and the management plan that is determined by multiplying 100%, in order to determine the level of effectiveness achieved to achieve goals. The conclusion that financial management by the Makassar City Education Office for the 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 fiscal years has reached the Effective criteria.

Keywords : *Financial Performance Analysis*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, taufik dan nikmat yang diberikan, sehingga skripsi yang berjudul

“Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sekaligus merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata Satu di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr.H.A.Arifudin Mane,SE.,M.SI., SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa beserta staf atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan

3. H,Muh.Idris, SE.,M.Si dan Thanwain,SE.,M.Si selaku pembimbing yang telah mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Banyak petunjuk, saran, dan motivasi yang sangat berharga dari pembimbing kepada penulis.
4. Dr.Firman Menne,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai penasihat akademik yang telah mengarahkan penulis dalam proses kebahagiaan.
5. Seluruh Dosen, Staf Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa terkhusus seluruh Dosen Akuntansi yang telah memberikan saran-saran dan kritik dalam pembuatan skripsi ini.
6. Teristimewah kepada Ayahanda Leonardus, Ibundan Theresia, saudara tercinta Elisabet, Hironimus, Silfiani, dan Yodeniuss, Kakek dan Nenek serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Rudi Seran pria hebat, motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.
8. Teman seperjuangan Jurusan Akuntansi : Dewi, Nurul, Ani, Icha, Majida, Wati, Hesty, Meti dan Mina serta teman-teman kainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terimakasih atas nasihat, motivasi serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Akhir kata "Tak ada gading yang tak retak" mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh, karena itu besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ramat-Nya kepada kita semua dan apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 06 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

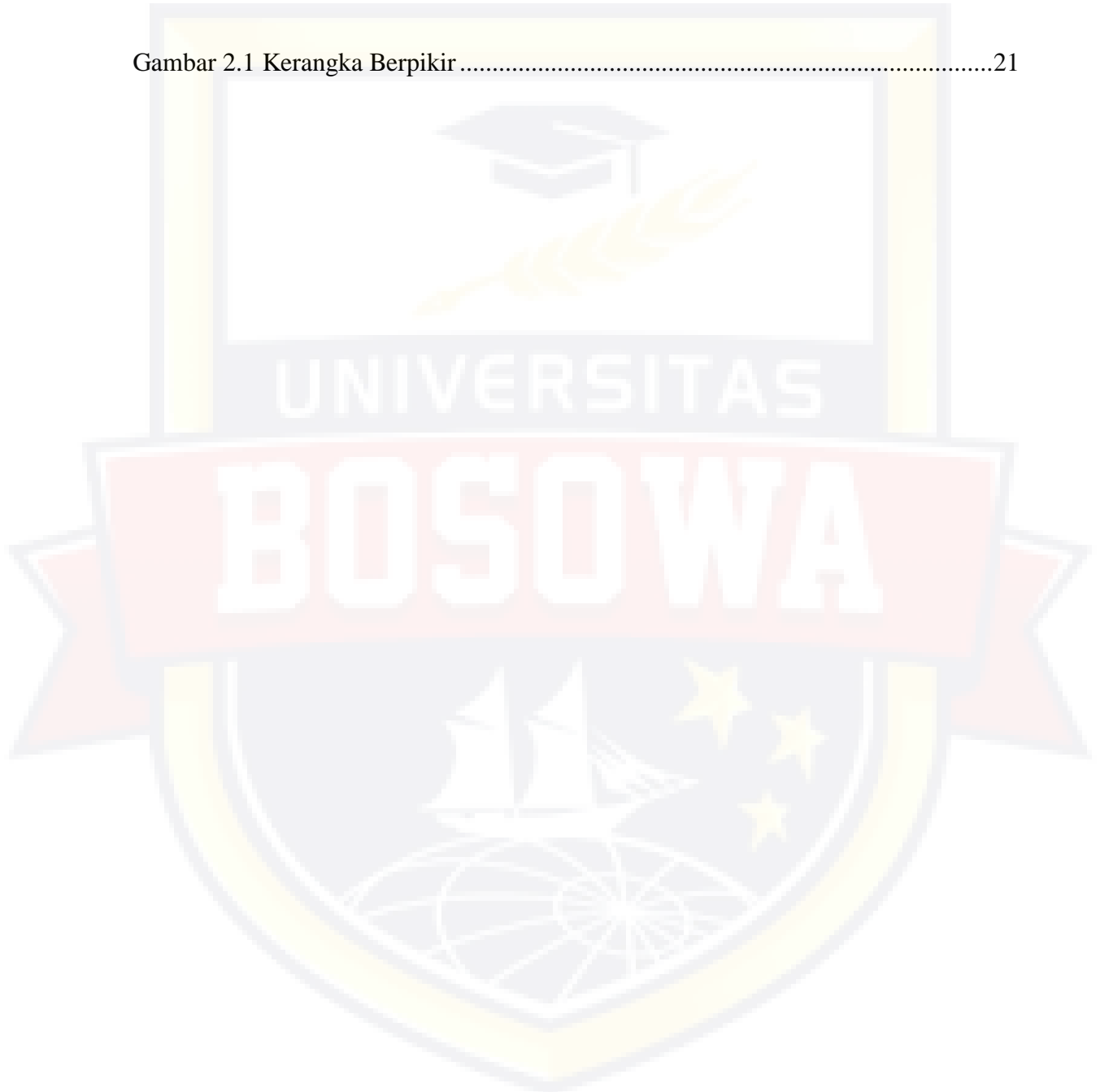
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Kinerja Keuangan	8
2.1.2 Laporan Keuangan	15
2.1.3 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah	18
2.2 Kerangka Pikir	20
2.3 Hipotesis	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Metode Analisis	25
3.6 Defenisi Operasional	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Waktu dan Tempat	27
4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	27
4.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	30
4.3.1 Visi	30
4.3.2 Misi	31
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	32
4.5 Analisis Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	37
4.6 Analisis dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan	51
4.7 Karakteristik Laporan Keuangan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir21



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Tidak Langsung).....	39
Tabel 4.2 (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk Program Kerja Belanja Pegawai (Langsung).....	40
Tabel 4.3 (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk Program Kerja Belanja Barang dan Jasa.....	41
Tabel 4.4 (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk Program Kerja Belanja Modal.....	42
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (Tidak Langsung).....	43
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (Langsung).....	44
Tabel 4.7 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.....	45
Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Belanja Modal.....	45
Tabel 4.9 Gabungan Rencana Anggaran SKPD Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	46
Tabel 4.10 Gabungan Realisasi Rencana Anggaran SKPD Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	48
Tabel 4.11 Gabungan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran SKPD Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.....	49
Tabel 4.12 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak manusia yang paling asasi. Manusia menemukan esensi dirinya pada potensi intelektualnya. Salah satu anugerah Tuhan yang membuat iri makhluk-makhluk lainnya atas diri manusia di alam semesta ini adalah akal. Sebagai potensi tak terbatas, akal manusia bergerak dari titik awal kelahiran jasadnya, hingga ke kedewasaan pengetahuannya. Pendidikan pun lahir sebagai sebuah jalan sistematis yang diciptakan oleh kesepakatan sosial, upaya menegakkan proses kemanusiaan tersebut. Pendidikan menjadi suatu usaha mengaktualkan potensi kemanusiaan itu pada jiwa-jiwa yang lahir dengan hak haknya (Andy,2011).

Perhatian terhadap pendidikan, tidak hanya menjadi fokus perhatian bangsa-bangsa terbelakang dan berkembang. Organisasi dunia (WHO) membentuk satu lembaga khusus yang menangani pendidikan, yakni UNESCO. UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan HAM. UNESCO didirikan pada tanggal 4 November 1946, di kota Paris-Perancis. Tugas utamanya adalah memajukan kerja sama antarbangsa di bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan tersebut. Sekarang ini, UNESCO beranggotakan 191 negara (termasuk Indonesia) dan bermarkas besar di Unesco House, Place de Fontenoy, Paris de, France.

Di Indonesia sendiri Kementerian Pendidikan sebagai lembaga tertinggi pendidikan menetapkan misi atau tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi Kemdikbud 2014, yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”

Dalam upaya mewujudkan visi-misi pendidikan serta sebagai upaya mendorong organisasi ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu mencapai seluruh amanat para pendiri negeri ini (*found the fahter*), kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan menjadi salah satu penentu terhadap capaian keberhasilan pencapaian cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terwujudnya cita-cita negara yang dilaksanakan melalui kebijakan, program/kegiatan pendidikan, rencana strategis maupun rencana kerja Dinas pendidikan dapat dilihat pada capaian hasil kerja (kinerja) Pegawai Negeri sipil yang ada di dalamnya. (Hambali, 2015)

Kinerja dimaknai sebagai hasil atas pekerjaan yang dilakukan seseorang terhadap pekerjaan tertentu. Pekerjaan berhubungan erat dengan pencapaian hasil seorang. Jika kinerja merupakan merupakan hasil yang dicapai seseorang atas satu beban pekerjaan tertentu, maka kinerja juga dapat ditafsirkan sebagai satu perbandingan antar apa yang ditetapkan melalui rencana dengan apa yang telah dicapai dalam hasil. (Hambali, 2015)

Di Indonesia bagian timur, Provinsi Sulawesi Selatan disorot sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NDP) yang dirilis Kemdikbud pada November 2016 lalu, keberbikahan pemerintah kota Makassar pada pengalokasian APBD ke sektor pendidikan masih jauh dari amanah Undang-Undang Pendidikan. Persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD (di luar transfer daerah), Pemerintah Kota Makassar hanya mengalokasikan 14,2 persen anggaran pendidikan dari total APBD kota Makassar sebesar Rp.3.825,2 milyar. Angka ini meningkat tipis 0,5 perse jika dibandingkan pada tahun 2015 pada angka 13,7 persen dari total APBD kota Makassar. Padahal jika mengacu pada UU Pendidikan, jelas dinyatakan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka persentase anggaran APBD kota Makassar ke sektor pendidikan tersebut menempatkan kota Makassar berada di peringkat 12 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan terkait alokasi anggaran APBD ke sektor pendidikan. (Danny Pomanto,2017)

Berdasarkan data terbaru pada tahun 2017, Pemerintah Kota Makassar bakal mengelola anggaran negara sebesar Rp 3,8 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Makassar Erwin Syafruddin Haiya mengatakan “anggaran tahun 2017 lebih rendah dibanding tahun 2016 yakni sebesar Rp 3,9 triliun. Namun tidak akan mengganggu sistem pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Makassar. Tanpa anggaran pun pemerintah selalu siap jadi pelayan rakyat”. Terkait dengan anggaran

belanja 2017, Dinas Pendidikan Makassar memiliki anggaran paling besar dibanding perangkat kerja lainnya yakni Rp 971 miliar lebih menyusul, Dinas Pekerjaan Umum Makassar sebesar Rp 541 miliar lebih, dan Dinas Kesehatan Makassar Rp 442 miliar lebih. Erwin menambahkan total anggaran ini akan dimanfaatkan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Makassar Ismunandar mengatakan “untuk pengelolaan anggaran akan di fokuskan kepada pembentukan karakter para pelajar di Makassar, Salah satunya yakni mengadakan sarana - prasana yang ada di kelas laboratorium, di Lab Komputer atau Lab Biologi dan lainnya. Di Pendidikan itu fokusnya hanya kepada pengembangan pendidikan berkarakter”.

Rancangan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan : Belanja Tidak Langsung : Rp 884.375.033.000,- ; Belanja Langsung : Rp 87.509.588.000; Total Belanja : Rp 971.884.621.000,-. (Saldy dan Ina, 2017). Terlepas dari gambaran prestasi-prestasi peningkatan tersebut dari pemerintah pusat, apakah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian perkembangan yang sama dalam kinerja keuangan dinas pendidikannya?

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi (Mahsun,2009). Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi analisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah suatu penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian

pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu.

Makassar sebagai Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sorotan terutama dalam upaya penilaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian di atas, di balik data-data angka yang ada, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan DISPENDIK Provinsi Sulawesi Selatan, maka diambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menjawab kebutuhan informasi para pemegang kepentingan laporan keuangan sebagai landasan kinerja suatu instansi atau organisasi. Dalam lingkup akuntansi sektor publik, akuntansi membantu pengelolaan keuangan organisasi-organisasi sektor publik terutama pemerintah sekaligus membantu masyarakat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Dengan digunakan analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan Kinerja Keuangan dalam rencana keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perubahan Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

2. Bagaimana analisis tren pada keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui Perubahan kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap realisasi anggaran pendidikan sebagai kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui perbandingan laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tiap periode.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisa Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teorik manfaat penelitian dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan perbandingan laporan keuangan beberapa periode.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan didalam menganalisa kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kemajuan pendidikan daerah Sulawesi Selatan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar, memecahkan masalah, dan menganalisa pengaruh ilmu ilmu akuntansi dalam penerapan terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

a. **Pengertian Kinerja Keuangan**

Istilah kinerja seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan/ organisasi. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai perusahaan/ organisasi dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan/ organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.

Kinerja juga bisa diartikan sebagai suatu prestasi kerja, sebagai prestasi kerja maka penilaian atas prestasi kerja itu dapat dilihat dari siapa yang melakukan penilaian terhadap prestasi tersebut.

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, hal 503) adalah merupakan kata benda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (tt peralatan).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Menurut Mulyadi (2001) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. Penilaian kinerja bagi perusahaan memiliki tujuan pokok yaitu untuk memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (dalam Iskandar,2013).

Sucipto (2003), mendefenisikan kinerja keuangan yakni penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya (dalam Frenky,2017).

Kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan kaitan yang cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga jika kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan atau organisasi tersebut.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan atau organisasi pada suatu periode yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau organisasi tersebut.

b. Konsep Keuangan Daerah dan Penganggaran Pemerintahan

Dalam pasal 1 undang-undang No.17 tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berbicara tentang keuangan negara, tidak dapat terlepas dari sejumlah unsur keuangan negara dalam proses pengelolaannya, salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sambutannya sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pokok Pemrov Sulsel Tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp8,8 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp2 triliun lebih atau 29,39 persen, dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp6.8 triliun

lebih tentang APBD Tahun 2017, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel. APBD tahun 2017 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Adapun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa anggaran sektor publik terutama organisasi pemerintah penting disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, dan (3) untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat (dalam medusyam,2012).

c. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik (dalam Riadi,2016)

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

(1) Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. (2) Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. (3) Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (4) Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

d. Analisa Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2006:242):

(1) Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih

dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif). (2) Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. (3) Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. (4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. (5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. (6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. (7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. (8) Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. (dalam Riadi,2016)

e. Penilaian Kinerja Keuangan

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sementara bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
 2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
 3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
 4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
 5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
- f. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama sebagai tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau organisasi tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Munawir (2010:2): Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan (Lerian,2014).

Menurut Myer dalam buku Financial Statement Analysis (S. Munawir, 2007:5), laporan keuangan adalah :

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir suatu periode, kedua daftar tersebut adalah daftar neraca dan posisi keuangan serta daftar pendapatan atau daftar laba rugi, pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar laba yang

tak dibagikan (laba ditahan)” (*dalam pengertian laporan keuangan menurut para ahli,2013*).

Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Selanjutnya menurut zaky Baridwan (2004:17) yaitu :

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan, dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan lain sebagai laporan kepada pihak diluar perusahaan” (*dalam Rahmadiana,2014*).

b. Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga

c. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini. (2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. (3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. (4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. (5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. (6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. (7) Informasi keuangan lainnya.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) adalah : Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: “asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

d. Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan yang diambil.

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:57), tujuan analisis laporan keuangan adalah :

1. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting guna pengambilan keputusan ekonomi.
2. Diperlukan analisis terhadap laporan keuangan, utamanya dalam memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
3. Untuk menyakinkan para pengambilan keputusan (dalam Agastha,2015).

2.1.3 Rasio Pengukuran Keuangan Pemerintah

Efektifitas pemberlakuan otonomi daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak januari 2001 (Perda no.11 tahun 2003) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah maka perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah masing-masing kabupaten dan Kabupaten. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian terhadap perkembangan kinerja keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

a. Rasio Kemandirian

Mahmudi, 2010 mengatakan bahwa “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya” (dalam Byckeng,2015).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pem.pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Teguh,2015).

Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rasio Penerimaan PAD}}{\text{Tasget Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

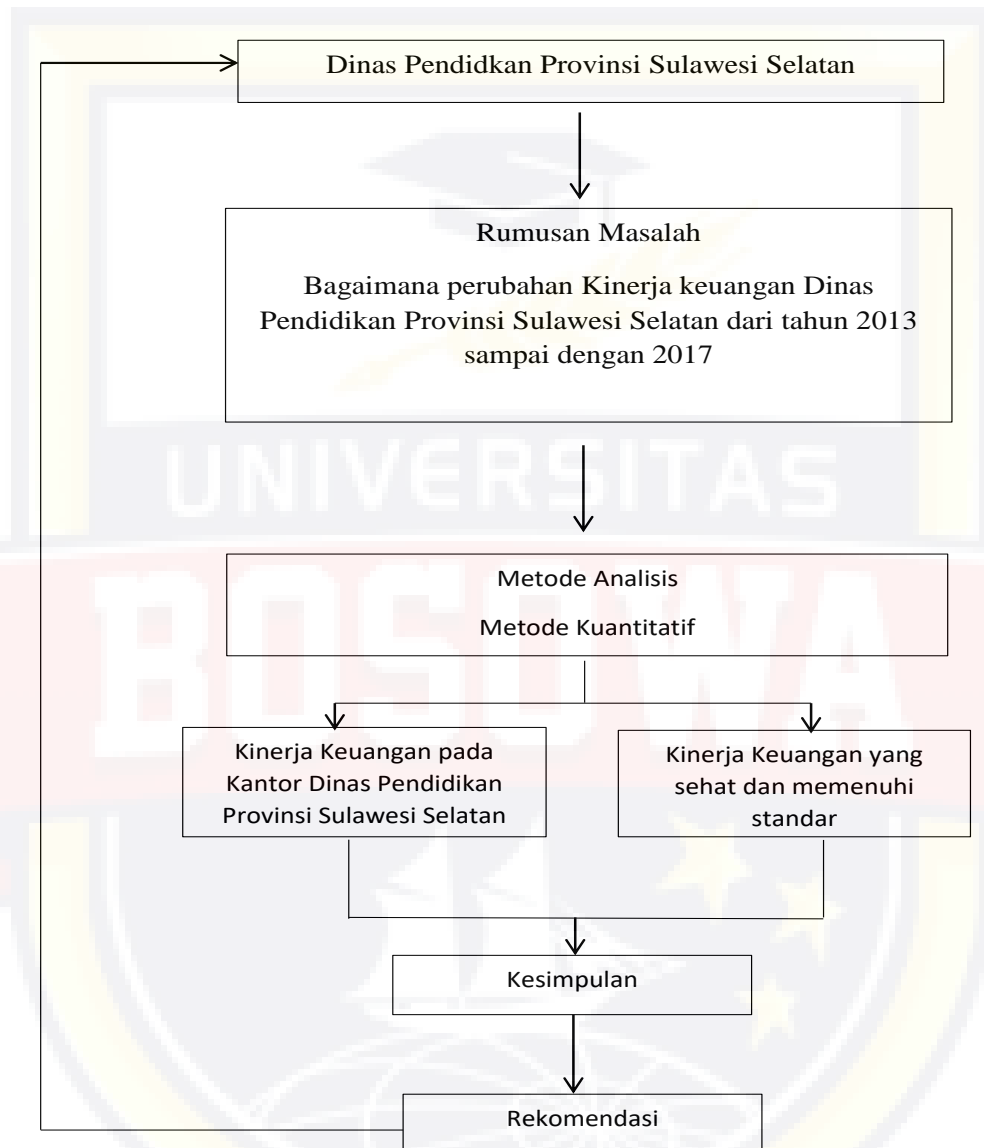
c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio), Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - Xn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pikir

GAMBAR 2.1. KERANGKA BERPIKIR

2.3 Hipotesis

Sebagai dasar pembahasan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini mengajukan hipotesis yaitu:” Diduga

bahwa kinerja keuangan pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum sesuai dengan yang diharapkan”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang direncanakan pada penelitian ini kurang lebih satu bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan Mei.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan mengawasi dan mempelajari secara langsung Kinerja Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja di Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat dari Laporan Keuangan sebelumnya dan Analisis Tren.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Objek Penelitian berupa Laporan Keuangan tahun 2012-2016.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu pencarian data primer dengan menggunakan dua macam cara yaitu:

1. Metode Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Peneliti bertemu pihak Dinas Pendidikan Provinsi SULSEL untuk meminta mengenai :

1. Gambaran umum pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Gambaran umum keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi SULSEL

2. Metode Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari literatur-literatur dan buku-buku yang mendukung.

3.5 Metode Analisis

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif.

1. Analisis Perbandingan Laporan keuangan

Membandingkan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2013 sampai dengan 2017.

2. Rasio Pengukuran Keuangan Pemerintah

a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pem. pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rasio Penerimaan PAD}}{\text{Tasget Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RpXn - Xn - 1}{RpXn - 1} \times 100\%$$

3.6 Defenisi Operasional

1. Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai Dinas Pendidikan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.
2. Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Misalnya perencanaan keuangan untuk peningkatan fasilitas, dan rehabilitas gedung sekolah di provinsi sulawesi selatan.
3. Kinerja Keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dinas pendidikan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indicator kecukupan dan modal. Dapat dilihat dari pencapaian sarana prasarana dan kepuasan akan peningkatan sistem pelayanan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Waktu dan Tempat

Guna memperoleh sejumlah data baik primer maupun sekunder, maka diperlukan adanya penelitian langsung di lapangan. Penelitian oleh penulis dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempersempit ruang lingkup penelitian hanya pada Subag Bagian Keuangan saja. Penelitian tersebut berlangsung selama 1 bulan ,dimulai dari april sampai mei.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan

Latar belakang terbentuknya kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang dikepalai oleh menteri pengajaran yang bernama Katoppo. Kantor wilayah pada waktu itu bertempat di gedung SMA Candra Kirana yang sekarang berada di jalan Sungai Tangka. Pada tahun 1946-1950, Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan berubah menjadi Inspektur Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh Azis Nompo.

Pada tahun 1950 Inspektur Pendidikan di daerah Sulawesi Selatan berubah namanya menjadi Kantor Jawatan Pengajaran Provinsi Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh H. Sondat dan wakilnya Mangindaan. Kantor tersebut bertempat di kantor

Walikota Madya Tk. II Ujung Pandang yang sekarang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani.

Pada tahun 1957 kantor tersebut berubah nama menjadi Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Tahun 1961 kantor tersebut dijabat oleh S. N. Turangan dan wakilnya H. Laside. Kemudian pada bulan Agustus 1964, H. Laside diangkat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sampai pada tahun 1967 dan pada tahun itu juga jabatan diserahkan kepada Syamsudin Tang. Tahun 1968, Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan diserahterimakan dari Syamsudin Tang kepada E. Agus Salim Mokodompit, M. A. sebagai kepala biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 desember 1979 jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahkan kepada Drs. A. Rasyid yang sebelumnya sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Tanggal 11 desember 1981 jabatan tersebut beralih dari Drs. A. Rasyid kepada Letkol Soepomo. Pada tanggal 22 februari 1983 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahterimakan kepada Drs. Athaillah. Tahun 1987 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Athaillah kepada Drs. Aminuddin Mahmud.

Berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 09/MPK/1991 tanggal 17 februari 1991, jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahkan dari Drs. Amiruddin Machmud kepada Drs. Abdul Djabbar. Selanjutnya, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 217/C/1993 pergantian jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 januari 1994 dari Drs. Abdul Djabbar diganti oleh Drs. Amiruddin Maula yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahkan dari Drs. Amiruddin Maula kepada Ir. H. M. Arifin Thalib.

Pada tanggal 1 Januari 2001, jabatan kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserahkan dari Ir. H. M. Arifin Thalib kepada Drs. Ngaro, M. Pd. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 173/O/1983 tentang struktur organisasi vertikal, tata kerja kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan berubah nama menjadi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Drs. Ngaro, M. Pd dan Wakilnya Drs. A. Muh. Noer Sanusi, M. Si. Pada tanggal 25 April 2003, Drs. H Ngaro, M. Pd. Menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan digantikan oleh Drs. H. A. Muh. Noer Sanusi, M. Si. dan Drs. Hanafi Mappasomba, M. Pd. sebagai wakilnya. Setelah tanggal 31 Oktober 2005 Drs.

H.A. Muh. Noer Sanusi, M. Si. mengakhiri masa jabatannya dan diganti oleh Drs. H. A. Patabai Pabokori (hingga sekarang ini) yang sebelumnya menjadi bupati Kabupaten Bulukumba dan Drs. H. Hanafi Mappasomba tetap menjadi Wakil Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 1 November 2006 Drs. Hanafi Mappasomba, memasuki masa jabatan sehingga digantikan oleh Drs. Muh. Saleh Gottang.

4.3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

4.3.1 Visi

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Perencanaan Strategik (Renstra) Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan akuntabilitas kinerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini di nilai dengan merumuskan pernyataan Visi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit kerja/instansi. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yakni :

“MEWUJUDKAN PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN YANG MANDIRI DAN BERKUALITAS GUNA TERCIPTANYA MASYARAKAT MADANI YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN”.

Visi tersebut mencerminkan aspirasi cita-cita sebagai berikut :

1. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dimiliki keunggulan dalam proses pembelajaran di sekolah dan memiliki hasil belajar yang memadai.
2. Pendidikan bagi semua anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah mengandung komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan kepada semua anak usia sekolah dan memperoleh pelajaran pendidikan yang memadai.
3. Memiliki daya saing yang tinggi ditingkat daerah nasional dan global untuk mendukung terciptanya iklim pendidikan yang inovatif dan kompetitif.

4.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Misi. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang telah ditetapkan agar Dinas Pendidikan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah :

1. Mengembangkan pembinaan Pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan daerah, nasional dan global.
2. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kompetitif.
3. Meningkatkan Profesionalisme tenaga kependidikan.

4. Memantapkan standar kendali mutu dan relevansi pendidikan serta pendayagunaan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan pembinaan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan Iptek dan Imtaq, Wawasan Keunggulan, Budaya, Penumbuhan Jiwa Patriotic serta mendorong terciptanya masyarakat belajar.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan program kepemudaan, Olah raga seni dan budaya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
7. Mengembangkan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang sesuai adat istiadat, agama dan kemajuan Iptek.

Pernyataan Misi tersebut sangat berkaitan dengan keterlibatan pihak luar termasuk masyarakat dalam pembangunan pendidikan, karena merekalah yang berhak mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

4.4. Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas pokok dari tiap bagian pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi

Selatan, yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan Dinas Pendidikan serta merumuskan kebijakan teknis bidang pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

2. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya dan pengawasan internal serta kedinasan lainnya.

3. Bagian Tata Usaha

1) Sub Bagian Program, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pengumpulan data, menganalisa, penyajian dan penyimpanan anggaran dinas statistik pendidikan serta menyelenggarakan identifikasi, perumusan dan penyusunan pembangunan pendidikan.

2) Sub Bagian Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mitasi, kenaikan pangkat dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan meliputi menyusun anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.

4) Sub Bagian Umum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dinas meliputi suratmenyurat, kearsipan, pengadaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga dinas.

4. Bagian Sarana dan Prasarana

1) Seksi Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyimpan bahan dan

menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan teknis di bidang pengadaan sarana sekolah.

- 2) Seksi Perawatan Sarana Sekolah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pembinaan teknis perawatan sarana dan prasarana sekolah.
 - 3) Seksi penyediaan buku, alat peraga dan modul dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pembinaan teknis serta melakukan analisis kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta perawatan sarana dan prasarana sekolah.
 - 4) Seksi Pembukuan Sarana/ Prasarana Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun pedoman pembukuan sarana dan prasarana sekolah.
5. Sub Dinas Pendidikan Agama dan Pendidikan Dasar
- 1) Seksi Kurikulum Agama dan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pembinaan di bidang kurikulum agama dan pendidikan dasar.
 - 2) Seksi Pengembangan Tenaga kependidikan agama dan Dikdass dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan petunjuk pelaksanaan dan pembinaan di bidang pengembangan tenaga pendidikan agama dan pendidikan dasar.

- 3) Seksi Pembinaan Manajemen Sekolah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas perumusan dan manajemen sekolah meliputi struktur organisasi, mekanisme kerja, pemahaman visi sekolah serta pendidikan.
 - 4) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis program pengembangan dan pembinaan kualitas pendidikan luar sekolah dan pendidikan terpadu.
6. Sub Dinas Pendidikan Menengah Atas (Dikmentas)
- 1) Seksi Kurikulum, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan determinasi kurikulum dan kalender pendidikan bagi SMA.
 - 2) Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan tenaga kependidikan.
 - 3) Seksi Pembinaan manajemen Sekolah, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang manajemen sekolah.
 - 4) Seksi Pendidikan Luar Biasa (SLB), oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan luar biasa.
7. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur)

- 1) Seksi Kepemudaan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan di bidang kepemudaan.
 - 2) Seksi Olahraga, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan olahraga.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan generasi muda dan kesenian.
 - 4) Seksi Pendidikan Kesenian, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan kesenian daerah organisasi pendidikan kesenian masyarakat.
8. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah
- 1) Seksi Sarana dan Tenaga Teknis, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang sarana dan tenaga teknis.
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan luar sekolah.
 - 3) Seksi Pelatihan dan Penataran, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang

Pelatihan dan Penataran dan Pendidikan Luar Sekolah, non pendidikan luar sekolah dan kemasyarakatan.

- 4) Seksi Keterampilan Perempuan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijaksanaan teknis di bidang keterampilan pendidikan.
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.5 Analisis Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, maka tentunya program/kegiatan pemeriksaan yang dilakukan tidak terlepas dari program/kegiatan pengelolaan/belanja pada kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Adapun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung, kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, misalnya belanja pegawai. Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja Lansung, kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja langsung Terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, dan aset tetap lainnya.

Untuk melengkapi data analisis pengelolaan (pemeriksaan) , maka data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data untuk lima tahun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, yakni masing-masing tahun anggaran belanja 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Sedangkan untuk lebih jelasnya mengenai rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dalam satu tahun anggaran dan realisasi per periodenya

serta masing-masing perkembangannya, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 4.1. (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN UNTUK PROGRAM KERJA BELANJA PEGAWAI (TIDAK LANGSUNG).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	70.236.395.449,5,-	70.236.395.449,5,-	70.236.395.449,5,-	70.236.395.449,5,-	280.945.581.798,-	0,00%
2014	70.657.814.059,5,-	70.657.814.059,5,-	70.657.814.059,5,-	70.657.814.059,5,-	282.631.256.238,-	0,60%
2015	96.022.871.824,-	96.022.871.824,-	96.022.871.824,-	96.022.871.824,-	384.091.487.296,-	26,4%
2016	238.494.095.250,-	238.494.095.250,-	238.494.095.250,-	238.494.095.250,-	953.976.381.000,-	59,70%
2017	257.012.690.250,-	257.012.690.250,-	257.012.690.250,-	257.012.690.250,-	1.028.050.761.000,-	7,20%
Total	732.423.866.833,-	732.423.866.833,-	732.423.866.833,-	732.423.866.833,-	2.929.695.467.332,-	X = 18,78 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 280.945.581.798,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 282.631.256.238,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 384.091.487.296,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 953.976.381.000, dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.028.050.761.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 10,78, % pertahunnya.

TABEL 4.2. (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN UNTUK PROGRAM KERJA BELANJA PEGAWAI (LANSUNG).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	4.588.531.200,-	4.588.531.200,-	4.588.531.200,-	4.588.531.200,-	18.354.124.800,-	0%
2014	5.001.499.008,-	5.001.499.008,-	5.001.499.008,-	5.001.499.008,-	20.005.996.032,-	8,26%
2015	5.500.000.000,-	5.500.000.000,-	5.500.000.000,-	5.500.000.000,-	22.000.000.000,-	9,06%
2016	5.949.400.000,-	5.949.400.000,-	5.949.400.000,-	5.949.400.000,-	23.797.600.000,-	7,51%
2017	6.230.704.400,-	6.230.704.400,-	6.230.704.400,-	6.230.704.400,-	24.922.817.600,-	4,51
Total	27.270.134.608,-	27.270.134.608,-	27.270.134.608,-	27.270.134.608,-	109.080.538.432,-	X = 5,87 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja pegawai (Langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 18.354.124.800,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 20.005.996.032,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 23.797.600.000,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 109.080.538.432,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 5,87 % pertahunnya.

TABEL 4.3. (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN UNTUK PROGRAM KERJA BELANJA BARANG DAN JASA.

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	8.082.194.000,-	8.082.194.000,-	8.082.194.000,-	8.082.194.000,-	32.328.776.000,-	0%
2014	8.324.659.820,-	8.324.659.820,-	8.324.659.820,-	8.324.659.820,-	33.298.639.280,-	2,90%
2015	8.657.646.212,-	8.657.646.212,-	8.657.646.212,-	8.657.646.212,-	34.630.584.848,-	3,80%
2016	10.318.522.000,-	10.318.522.000,-	10.318.522.000,-	10.318.522.000,-	41.274.088.000,-	16,10%
2017	11.323.835.275,-	11.323.835.275,-	11.323.835.275,-	11.323.835.275,-	45.295.341.100,-	8,90%
Total	46.706.857.307,-	46.706.857.307,-	46.706.857.307,-	46.706.857.307,-	186.827.429.228,-	X = 6,34 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 32.328.776.000,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 33.298.639.280,- ,tahun 2015 sebesar Rp.34.630.584.848,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 41.274.088.00,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 45.295.341.100,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 6,34 % pertahunnya.

**TABEL 4.4. (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN
UNTUK PROGRAM KERJA BELANJA MODAL.**

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	5.152.340.000,-	5.152.340.000,-	5.152.340.000,-	5.152.340.000,-	20.609.360.000,-	0%
2014	5.389.347.620,-	5.389.347.620,-	5.389.347.620,-	5.389.347.620,-	21.557.390.480,-	4,40%
2015	5.712.708.476,-	5.712.708.476,-	5.712.708.476,-	5.712.708.476,-	22.850.833.904,-	5,70%
2016	5.995.128.825,-	5.995.128.825,-	5.995.128.825,-	5.995.128.825,-	23.980.515.300,-	4,70%
2017	6.699.776.800,-	6.699.776.800,-	6.699.776.800,-	6.699.776.800,-	26.799.107.200,-	10,5
Total	28.949.301.721,-	28.949.301.721,-	28.949.301.721,-	28.949.301.721,-	115.797.206.884,-	X = 5,06 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja modal. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 20.609.360.000,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 21.557.390.480,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 22.850.833.904,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 23.980.515.300,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 26.799.107.200,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 5,06 % pertahunnya.

TABEL 4.5. REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (TIDAK LANSUNG).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	65.916.461.722. 5,-	65.916.461.722. 5,-	65.916.461.722. 5,-	65.916.461.722. 5,-	263.665.846.890, -	0%
2014	68.538.079.637, 5,-	68.538.079.637, 5,-	68.538.079.637, 5,-	68.538.079.637, 5,-	274.152.318.550, -	3,8 %
2015	90.783.701.740. ,-	90.783.701.740. ,-	90.783.701.740. ,-	90.783.701.740. ,-	363.134.806.960, -	24,50%
2016	230.463.828.75 0,-	230.463.828.75 0,-	230.463.828.75 0,-	230.463.828.75 0,-	921.855.315.000, -	60,6
2017	252.383.040.00 3,-	252.383.040.00 3,-	252.383.040.00 3,-	252.383.040.00 3,-	1.009.532.160.01 2,-	8,70%
Total	708.085.111.85 3,-	708.085.111.85 3,-	708.085.111.85 3,-	708.085.111.85 3,-	2.832.340.447.41 2,-	X = 19,52 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja pegawai (tidak langsung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 263.665.846.890,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 274.152.318.550,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 363.134.806.960,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 921.855.315.000,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.009.532.160.012,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 19,52 % pertahunnya.

TABEL 4.6. REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (LANSUNG).

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	4.461.072.000,-	4.461.072.000,-	4.461.072.000,-	4.461.072.000,-	17.844.288.000,-	0%
2014	4.990.027.680,-	4.990.027.680,-	4.990.027.680,-	4.990.027.680,-	19.960.110.720,-	10,60%
2015	5.188.023.000,-	5.188.023.000,-	5.188.023.000,-	5.188.023.000,-	20.752.092.000,-	3,80%
2016	5.637.423.000,-	5.637.423.000,-	5.637.423.000,-	5.637.423.000,-	22.549.692.000,-	7,97%
2017	5.895.870.525,-	5.895.870.525,-	5.895.870.525,-	5.895.870.525,-	23.587.482.100,-	4,40%
Total	26.172.416.205,-	26.172.416.205,-	26.172.416.205,-	26.172.416.205,-	104.693.620.820,-	X = 5,4 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja belanja pegawai (Lansung). Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 17.844.288.000,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 19.960.110.720,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 20.752.092.000,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 22.549.692.000,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 23.587.482.100,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 5,4 % pertahunnya.

Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	7.193.152.660,-	7.193.152.660,-	7.193.152.660,-	7.193.152.660,-	28.772.610.640,-	0%
2014	7.575.440.800,-	7.575.440.800,-	7.575.440.800,-	7.575.440.800,-	30.301.763.200,-	5,04 %
2015	8.138.176.000,-	8.138.176.000,-	8.138.176.000,-	8.138.176.000,-	32.552.704.000,-	6,90%
2016	9.554.308.944,5,-	9.554.308.944,5,-	9.554.308.944,5,-	9.554.308.944,5,-	38.217.235.778,-	14,80%
2017	10.686.261.000,-	10.686.261.000,-	10.686.261.000,-	10.686.261.000,-	42.745.044.000,-	10,6
<i>total</i>	43.147.339.404,5,-	43.147.339.404,5,-	43.147.339.404,5,-	43.147.339.404,5,-	172.589.357.618,-	X = 7,5 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja barang dan jasa. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 28.772.610.640,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 30.301.763.200,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 32.552.704.000,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 38.217.235.778,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 42.745.044.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 7,5 % pertahunnya.

TABEL 4.8. REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL.

Tahun	Triwulan				Jumlah Anggaran (Rp)	Perkembangan (%)
	I	II	III	IV		
2013	4.637.106.000,-	4.637.106.000,-	4.637.106.000,-	4.637.106.000,-	18.548.424.000,-	0%
2014	5.012.093.288,-	5.012.093.288,-	5.012.093.288,-	5.012.093.288,-	20.048.373.152,-	7,50%
2015	5.541.327.620,-	5.541.327.620,-	5.541.327.620,-	5.541.327.620,-	22.165.310.480,-	9,60%
2016	5.787.500.000,-	5.787.500.000,-	5.787.500.000,-	5.787.500.000,-	23.150.000.000,-	4,30%
2017	6.189.258.000,-	6.189.258.000,-	6.189.258.000,-	6.189.258.000,-	24.757.032.000,-	0,65
<i>total</i>	<i>27.167.284.908,-</i>	<i>27.167.284.908,-</i>	<i>27.167.284.908,-</i>	<i>27.167.284.908,-</i>	<i>108.669.139.632,-</i>	<i>X = 3,21 %</i>

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk program kerja Belanja Modal. Antara lain pada tahun 2013 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 18.548.424.000,- ,tahun 2014 sebesar Rp. 20.048.373.152,- ,tahun 2015 sebesar Rp. 22.165.310.480,- sedangkan untuk tahun 2016 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 23.150.000.000,- dan pada tahun 2017 jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 24.757.032.000,- dimana terjadi perkembangan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 3,21 % pertahunnya.

TABEL 4.9. GABUNGAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN.

Uraian	Tahun					Perkembangan(%) X
	2013	2014	2015	2016	2017	

Belanja pegawai (tidak langsung)	280.945.581.798,-	282.631.256.238,-	384.091.487.296,-	953.976.381.000,-	1.028.050.761.000,-	X=18,78 %
Belanja Pegawai (lansung)	18.354.124.800,-	20.005.996.032,-	22.000.000.000,-	23.797.600.000,-	24.992.817.600,-	X=5,87 %
Belanja Barang dan jasa	32.328.776.000,-	33.298.639.280,-	34.630.584.848,-	41.274.088.000,-	45.295.341.100,-	X= 6,34 %
Belanja Modal	20.609.360.000,-	21.557.390.480,-	22.850.833.904,-	23.980.515.300,-	26.799.107.200,-	X=5,06%
Total	352.237.842.598,-	357.493.282.030,-	463.572906.044,-	1.043.028.584.300,-	1.125.138.026.900,-	X=9,01 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat dijelaskan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) sebesar Rp. 280.945.581.798,- pada tahun 2013, Rp. 282.631.256.238,- pada tahun 2014, Rp. 384.091.487.296,- pada tahun 2015, Rp. 953.976.381.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 1.028.050.761.000,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 18,78 %. Untuk belanja pegawai (lansung) sebesar Rp. 18.354.124.800,- pada tahun 2013, Rp. 20.005.996.032,- pada tahun 2014, Rp. 22.000.000.000,- pada tahun 2015, Rp. 23.797.600.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 24.992.817.600,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 5,87%. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 32.328.776.000,- pada tahun 2013, Rp. 33.298.639.280,- pada tahun 2014, Rp. 34.630.584.848,- pada tahun 2015, Rp. 41.274.088.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 45.295.341.100,- pada tahun

2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 6,34 %. Sedangkan Untuk rencana belanja Modal sebesar Rp.20.609.360.000,- pada tahun 2013, Rp. 21.557.390.480,- pada tahun 2014, Rp. 22.850.833.904,- pada tahun 2015, Rp. 23.980.515.300,- pada tahun 2016, dan Rp. 26.799.107.200,- pada tahun 2017 dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 5,06 %.

TABEL 4.10. GABUNGAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR.

Uraian	Tahun					Perkembangan(%) X
	2013	2014	2015	2016	2017	
Belanja pegawai (tidak langsung)	263.665.846.890,-	274.152.318.550,-	363.134.806.960,-	921.855.315.000,-	1.009.532.160.012,-	X=19,52 %
Belanja Pegawai (lansung)	17.844.288.000,-	19.960.110.720,-	20.752.092.000,-	22.549.692.000,-	23.587.482.100,-	X=5,4 %
Belanja Barang dan jasa	28.772.610.640,-	30.301.763.200,-	32.552.704.000,-	38.217.235.778,-	42.745.044.000,-	X= 7,5 %
Belanja Modal	18.548.424.000,-	20.048.373.152,-	22.165.310.480,-	23.150.000.000,-	24.757.032.000,-	X=3,21 %
Total	328.831.169.530,-	344.462.565.622,-	438.604.913.440,-	1.005.772.242.778,-	1.062.151.178.512,-	X=8,9 %

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat dijelaskan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk setiap rencana belanja dalam setiap tahunnya. Antara lain untuk belanja pegawai (tidak langsung) sebesar Rp. 263.665.846.890,- pada tahun 2013, Rp. 274.152.318.550,- pada

tahun 2014, Rp. 363.134.806.960,- pada tahun 2015, Rp. 921.855.315.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 1.009.532.160.012,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 19,52 %. Untuk belanja pegawai (lansung) sebesar Rp. 17.844.288.000,- pada tahun 2013, Rp. 19.960.110.720,- pada tahun 2014, Rp. 20.752.092.000,- pada tahun 2015, Rp. 22.549.692.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 23.587.482.100,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 5,4 %. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 28.772.610.640,- pada tahun 2013, Rp. 30.301.763.200,- pada tahun 2014, Rp. 32.552.704.000,- pada tahun 2015, Rp. 38.217.235.778,- pada tahun 2016, dan Rp. 42.745.044.000,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 7,5%. Sedangkan Untuk rencana belanja modal sebesar Rp. 18.548.424.000,- pada tahun 2013, Rp. 20.048.373.152,- pada tahun 2014, Rp. 22.165.310.480,- pada tahun 2015, Rp. 23.150.000.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 24.757.032.000,- pada tahun 2017, dengan perkembangan rata-rata sebesar (X) = 3,21 %.

TABEL 4.11. GABUNGAN RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR.

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih Anggaran	
			(Rp)	(%)

2013	352.237.842.598,-	328.831.169.530,-	23.406.673.068,-	6,60%
2014	357.493.282.030,-	344.462.565.622,-	13.030.716.408,-	3,60%
2015	463.572.906.044,-	438.604.913.440,-	24.967.992.604,-	5,40%
2016	1.043.028.584.300,-	1.005.772.242.778,-	37.256.341.522,-	3,60%
2017	1.125.138.026.900,-	1.062.151.178.512,-	62.986.848.388,-	5,60%
Total	3.341.470.641.872,-	3.179.822.069.882,-	161.648.571.990,-	4,96 %.

Sumber data : Sub Keuangan Dispendik SulSel (data diolah : 2018)

Berdasarkan tabel 4.11, maka dapat dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan anggaran dan realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, antara lain : Untuk tahun 2013 total rencana anggaran sebesar Rp. 352.237.842.598, total realisasi anggaran sebesar Rp. 328.831.169.530 dengan selisih anggaran sebesar Rp. 23.406.673.068,- atau sebesar 6,6 %. Tahun 2014 total rencana anggaran sebesar Rp. 357.493.282.030, total realisasi anggaran sebesar Rp. 344.462.565.622 dengan selisih anggaran sebesar Rp. 13.030.716.408,- atau sebesar 3,6 %. Tahun 2015 total rencana anggaran sebesar Rp. 463.572.906.044,-, total realisasi anggaran sebesar Rp. 438.604.913.440,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 24.967.992.604,- atau sebesar 5,4 %. Kemudian untuk tahun 2016 total rencana anggaran sebesar Rp. 1.043.028.584.300,- total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.005.772.242.778,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 37.256.341.522,- atau sebesar 3,6 %. Sedangkan untuk tahun 2017 total rencana anggaran sebesar Rp. 1.125.138.026.900,- total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.062.151.178.512,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 62.986.848.388,- atau sebesar 5,6 %.

Berdasarkan besaran nilai anggaran pertahun tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa total rencana anggaran untuk lima tahun anggaran tersebut sebesar Rp. 3.341.470.641.872,- dan total realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.179.822.069.882,- dengan selisih anggaran sebesar Rp. 161.648.571.990,- atau sebesar 4,96 %. Selisih anggaran yang tidak dapat direalisasikan akan dialihkan menjadi Anggaran untuk tahun berikutnya.

4.6 Analisis dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, maka analisis dan penilaian efektivitas ini dapat dilakukan untuk menentukan efektivitas pengelolaan anggaran dari setiap tahun anggaran (2013,2014,2015,2016 dan 2017) dengan berpatokan pada tabel-tabel yang ada. Dalam menganalisis efektivitas pengelolaan Keuangan Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, maka analisis efektivitas yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran kemudian dikali seratus persen, atau :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran}{Rencana Anggaran} \times 100\%$$

Berikut analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja SKPD Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan :

1. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2013,

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran 2013}{Rencana Anggaran 2013} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{328.831.169.530}{352.237.842.598} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 93,4 \%$$

2. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2014,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran 2014}}{\text{Rencana Anggaran 2014}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{344.462.565.622}{357.493.282.030} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 96,4 \%$$

3. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2015,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran 2015}}{\text{Rencana Anggaran 2015}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{438.604.913.440}{463.572.906.044} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 94,6 \%$$

4. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2016,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran 2016}}{\text{Rencana Anggaran 2016}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.005.772.242.778}{1.043.028.584.300} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 93,4 \%$$

5. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2017 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran 2017}}{\text{Rencana Anggaran 2017}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.062.151.178.512}{1.125.138.026.900} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 94,4 \%$$

6. Analisis efektivitas pengelolaan anggaran lima tahun (2013,2014,2015,2016, dan 2017) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Lima Tahun}}{\text{Rencana Anggaran Lima Tahun}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.179.822.069.882}{3.341.470.641.872} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 95,2 \%$$

TABEL 4.12. KRITERIA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Presentase Efektivitas Pengawasan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Sub Keuangan Dispindik SulSel (d disesuaikan)

Keterangan :

1. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 80% asampai 90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan kriteria penilaian tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa efektifitas pengelolaan Keuangan Kantor Dinas Pendidikan Sulawwesi Selatan , antara lain :

Untuk tahun 2013 pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan angka persentase mencapai 93,4 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.,

Pada tahun 2014 pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi

Selatan dengan angka persentase mencapai 96,4 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.,

Pada tahun 2015 pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan angka persentase mencapai 94,6 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif., namun mengalami penurunan efektivitas 1,8 % dari tahun 2014.

Pada tahun 2016 pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan angka persentase mencapai 93,4 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif., mengalami penurunan efektivitas 1,2 % dari tahun 2015.

Kemudian Pada tahun 2017 pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan angka persentase mencapai 94,4 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif, mengalami kenaikan efektivitas 1% dari tahun 2016.,

Sedangkan untuk lima tahun 2013,2014,2015,2016 dan 2017 hasil analisis pengelolaan anggaran dimana telah menunjukkan tingkat capaian efektivitas

pengelolaan keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan angka persentase mencapai 95,2 %, maka angka persentase pengelolaan tersebut telah mencapai angka persentase kriteria antara 90% s/d 100% dengan demikian tergolong efektif.

4.7 Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang berguna untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan tersebut. Informasi ini bisa digunakan bagi pihak internal seperti manajemen, karyawan dan juga pihak eksternal seperti investor, kreditor, maupun pemerintah. Selain untuk mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu, laporan keuangan juga dijadikan dasar untuk pengambilan berbagai keputusan di masa depan. Karena laporan keuangan adalah hal yang sangat penting maka dalam pembuatannya harus memenuhi karakteristik laporan keuangan yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (IAI, 2002, hal.7-12).

Karakteristik Laporan Keuangan :

1. Dapat Dipahami (*Understandability*), Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Begitu juga dengan laporan keuangan juga harus disajikan dengan baik dan sesuai standart

agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Walaupun demikian, kesulitan pemakai untuk memahami informasi tertentu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memasukan informasi itu ke dalam laporan keuangan, karena laporan keuangan harus transparan.

2. Relevan (*Relevance*), Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Relevansi informasi bermanfaat dalam memprediksi atau meramalkan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*), yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Prediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan serta hal lainnya seringkali didasarkan pada informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu, inilah yang dimaksud dengan relevan. oleh karena itu dengan laporan keuangan yang relevan akan menjadikan pemakai informasi laporan keuangan sehingga dapat mendukung atau mengubah suatu keputusan yang akan diambil nantinya.
3. Keandalan (*Reliability*) ,Informasi yang baik harus and (*reliable*). Informasi memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajiannya dengan tulus atau jujur (*Faithful Representation*).Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi, karena jika informasi yang disajikan andal maka akan semakin relevan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak andal maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pemakai informasinya.

Keandalan informasi dipengaruhi oleh :

- 1) Penyajian Jujur, Agar dapat diandalkan, maka informasi harus menggambarkan dengan jujur keadaan sebenarnya, transaksi dan peristiwa yang seharusnya disajikan dan secara wajar.
- 2) Substantansi Mengungguli Bentuk, Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas.
- 3) Netralitas, Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan.
- 4) Pertimbangan Sehat, Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat menganfung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, seperti pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan dan sengaja menetapkan aktiva atau

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi yang membuat laporan keuangan menjadi tidak netral dan akan menjadikan laporan keuangan tidak andal.

5) Kelengkapan, Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang relevansinya.

4. Dapat Dibandingkan, Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian, transaksi yang sama harus dilakukan secara konsisten. Daya banding yang dimaksud adalah bukan berarti semuanya harus sama, melainkan harus berpegang pada standar akuntansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa dari total rencana keuangan Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk lima tahun anggaran sebesar Rp. 3.341.470.641.872,- dapat direalisasikan sebesar RP. 3.179.822.069.882 ,- dengan selisi anggaran sebesar RP. 161.648.571.990 atau sebesar 4.96% %. Selirih anggaran akan digunakan sebagai Anggaran dana tambahan pada tahun berikutnya, dan Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran masing-masing telah mencapai kriteria Efektif, dengan nilai efektivitas untuk lima tahun dengan angka persentase mencapai 95,2 %.

5.2 Saran

Kepada Pimpinan Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan selaku top leader agar menjaga dan lebih meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran keuangan belanja perangkat daerah sektor pendidikan dengan meningkatkan mutu kinerja pengelolaan anggaran, sehingga mencapai kriteria nilai efektifitas yang efektif tiap tahunnya dan terus mengalami kenaikan nilai efekti hingga mencapai 100%.

DAFTAR PUSTAKA

Agastha,2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Pt. Indosat,Tbk Dan Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, STIESIA Surabaya

Arifah,2011. Persepsi Masyarakat Makassar Terhadap Realisasi Anggaran Pendidikan Sebagai Landasan Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Hasanuddin.

Balqis,2015. Analisis Perbandingan, Common Size, dan Trend, invisiblehand51.blogspot.co.id

Byckeng,2015. Mengukur Kemampuan Keuangan Suatu Daerah, Sappipil.blogspot.com

<http://disdik.sulselprov.go.id/>

Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA.

Frenky,2017 . Kinerja Keuangan Perusahaan ,Ahlibaca.com

Hambali, 2015. Analisis Kinerja Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu,Kapuas.

<http://makassarkota.go.id/home>

<http://makassar.tribunnews.com/2016/12/29/wow-2017-dinas-pendidikan-makassar-bakal-kelola-rp-971-m-uang-negara>

<https://www.edunews.id/edunews/alokasi-anggaran-pendidikan-makassar-pada-tahun-2016-meningkat-tipis/>

IAI,2015. Penyajian Laporan Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta

Iskandar,2013. Pengukuran Kinerja, Artikel Sistem Pengendalian Manajemen

Kasmir, 2012, Analisis Laporan Keuangan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lerian.2014. Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi, Artikel Akuntansi

Medusyam,2012. Manajemen Keuangan Publik,
ThePublicAdministration.blogspot.com

Munawir, S. 2012. Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.

Rahmadiana,2014.Laporan Keuangan Dan Analisis Laporan
Keuangan,wordpress.com

Riadi.2016. Pengertian Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan,
KajianPustaka.com

Saifullah, 2017. Analisis Laporan Keuangan, www.bloggerarticle.com

Widada,2012.Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten ,Skripsi Universitas Negeri
Yogyakarta.

